

## BAHASA INDONESIA, PERUBAHAN SOSIAL, DAN MASA DEPAN BANGSA

*Aprinus Salam \**

### ABSTRACT

There has been a significance changing on the existence and conventional function of Indonesian language. The changing of political constellation in Indonesia, and the dominance of practical and economic paradigm made the conventional function of Indonesian language experiencing constriction.

In that changing, Indonesian Language did not able to accommodate its some primary functions anymore. The praxis of using Indonesian language becomes such of formality-rite just for being recognized as Indonesian citizen. However, in the midst of other potential divider elements such as religion, ethnicity, or locality, it is the fact that only Indonesian language that is still able to "guarantee" the future of Indonesian nationalism.

**Key Words:** Indonesian language, social movement, political constellation

### ABSTRAK

Telah terjadi perubahan penting tentang keberadaan dan fungsi konvensional bahasa Indonesia. Perubahan konstelasi politik di Indonesia, dan dominannya praksis dan paradigma ekonomi, menyebabkan fungsi konvensional bahasa Indonesia mengalami penyempitan. Dalam perubahan itu, Bahasa Indonesia tidak mampu lagi mengakomodasi beberapa fungsi utamanya. Praktik penggunaan bahasa Indonesia sekedar menjadi ritus formalitas untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Padahal, hanya bahasa Indonesia yang masih bisa "menggaransi" masa depan kebangsaan Indonesia, di tengah potensi lain, seperti agama, etnisitas, atau lokalitas yang berpotensi memecah-belah.

**Kata Kunci:** bahasa Indonesia, perubahan sosial, perubahan konstelasi

### PENGANTAR

Fungsi konvensional bahasa Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Pada masa beberapa tahun sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan, ada gairah nasionalisme yang membingkai dan memompa semangat berbahasa Indonesia sembari mencari proses-proses pembakuan. Pemilikan bahasa Indonesia disadari sebagai identitas yang mem-

bungkus rasa ber-Indonesia secara bersama, di tengah gejolak revolusi daerah-daerah karena beberapa perseteruan internal dan eksternal politik.

Pada waktu itu, berbagai gejolak politik berujung pada tahun 1965, dan Indonesia memasuki satu periode baru di bawah pemerintah Orde Baru. Boleh di kata, hingga tahun 1980-an, Bahasa Indonesia (masih) memegang peranan

\* Staf pengajar Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

penting bagi berbagai bentuk komunikasi sosial. Bahkan, sejumlah tulisan pada waktu itu mengkhawatirkan jika bahasa Indonesia menekan dan menyingkirkan bahasa daerah seperti terlihat pada tulisan Umar Kayam (1997)<sup>1</sup> dan dalam sebuah tulisan di *Kompas* tahun 1987.<sup>2</sup>

Akan tetapi, setelah memasuki tahun 1990-an, bahasa Indonesia semakin mengalami penyempitan fungsi konvensional, dikurung oleh berbagai bahasa lain, terutama bahasa Inggris, atau belakangan ini bahasa Cina, dan atau bahkan bahasa daerah. Artinya, terjadi berbagai hal yang berbeda atau bahkan bertentangan tentang fungsi konvensional bahasa Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, fungsi konvensional bahasa (verbal) juga mengalami "keterbatasan waktu" bersaing dengan bahasa visual (dan audio visual). Banyak proses komunikasi, dalam dunia yang semakin cepat, bahasa visual (dan audio visual) menggantikan fungsi konvensional bahasa verbal, termasuk dalam hal ini fungsi konvensional bahasa verbal bahasa Indonesia. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa dunia memasuki era visual.

Tulisan ini tidak mempersoalkan semua hal yang telah disinggung di depan. Tulisan ini menjelaskan sebab pasang surutnya fungsi konvensional bahasa Indonesia baik dalam perubahan konteks sosialnya maupun dalam konteks berbangsa Indonesia itu sendiri. Di samping itu, tulisan ini mempersoalkan keberadaan bahasa Indonesia di tengah dan berhadapan dengan fungsi konvensional lain seperti agama, kesukuan/kedaerahan, atau bahkan kemungkinan fungsi relatifnya di tengah budaya-budaya lokal di Indonesia.

## **BAHASA DAN PERUBAHAN (KONTEKS) SOSIAL**

Hal yang dimaksud sebagai fungsi konvensional bahasa Indonesia adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat (media) komunikasi resmi berbangsa, sebagai media komunikasi nasional yang menghubungkan berbagai masyarakat Indonesia yang majemuk, sebagai identitas dan kebanggaan nasional, dan sebagainya. Dengan

demikian, bahasa Indonesia diharapkan menjadi pegangan utama masyarakat Indonesia dalam mempraktikkan kehidupan sehari-harinya dalam berbagai kepentingan dan keperluan nasional dan sosial.

Akan tetapi, berdasarkan berbagai fenomena dan gejala yang dapat disaksikan bersama, fungsi konvensional itu mengalami berbagai pergeseran. Bahasa Indonesia tidak semakin memberikan peran penting dalam fungsi konvensional tersebut, tetapi justru mengalami penggerusan terus-menerus. Terdapat gejala, misalnya, orang Indonesia menjadi lebih "bangga" berbahasa Indonesia bercampur Inggris karena hal itu memperlihatkan kemodeman, kota, dan sekaligus terpelajar.

Selain itu, politik otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dan kebangkitan politik daerah/lokal sebagai konsolidasi daerah dalam mengembangkan identitas budaya lokalnya menyebabkan bahasa-bahasa daerah/lokal mengalami revitalisasi dalam berbagai tujuan dan kepentingan daerah bersangkutan. Hal itu terjadi karena selama bertahun-tahun daerah/lokal-lokal di Indonesia mengalami belenggu (ekspresi) budaya dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Pada waktu itu (budaya) daerah memang dihormati, tetapi daerah tidak lebih menjadi ajang pertunjukan dan menjadi tontonan nasional.<sup>3</sup>

Belakangan ini, di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah daerahnya menyelenggarakan festival sastra, dongeng, teater, atau musik dalam bahasa daerah bersangkutan tidak dalam rangka menjadi pertunjukan. Fenomena ini menjadi sesuatu yang agak berkebalikan dengan tesis Acciaioli, daerah tidak lagi menjadi tontonan dan pertunjukkan nasional, tetapi telah menempatkan dirinya menjadi tontonan dirinya sendiri. Dalam tinjauan yang sedikit berbeda, tetapi memberikan substansi yang sama, hal ini disebut sebagai kebangkitan adat (lokalitas) dalam mengurus dan menjadi dirinya sendiri, bangkitnya lokalisme atau daerahisme, suatu dorongan untuk merdeka lepas dari wacana ke-Indonesia-an.<sup>4</sup>

Memang, belum lama berselang, misalnya, bulan Oktober 2010 Yogyakarta menyelenggara-

kan *Jogya Java Carnival*. Peristiwa tersebut "diperkenalkan" dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia dalam peristiwa lokal dimaksudkan untuk menasionalkan lokalitas Yogyakarta dan penggunaan bahasa Inggris untuk menginternasionalkan lokalitas Jogja. Tak urung, sejumlah kalangan justru menyesalkan mengapa peristiwa tersebut tidak diperkenalkan secara resmi dalam bahasa Jawa. Penyesalan tersebut semakin memperlihatkan bahwa lokalitas, khususnya dalam berbahasa, memperlihatkan gejala yang semakin percaya diri.

Dalam berbagai praktiknya, tidak mengherankan jika kemudian "porsi" penggunaan berbahasa Indonesia yang sebelumnya tidak cukup luas tersebut mengalami pengurangan. Di samping faktor politis, dalam situasi kebangkitan bahasa dan budaya daerah tersebut, praktik penggunaan bahasa Indonesia, baik pada tataran struktur, sintaxis, morfologis, maupun semantis mengalami tumpang tindih dengan bahasa daerah lokal bersangkutan. Sebagai akibatnya, bahkan banyak di kalangan terpelajar sekalipun tidak mampu memperlihatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik pada tataran tertulis dan lisan, karena mengalami intervensi dan penetrasi bahasa lokal mereka.

Hal yang tidak mengkhawatirkan, bahasa daerah tidak atau belum berubah menjadi aset ekonomis yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan pengguna bahasa daerah, selain Jawa, jumlahnya tidak cukup signifikan bila dibandingkan pengguna bahasa Indonesia. Dalam situasi itu, bahasa Jawa jelas perlu diperhitungkan sebagai bahasa yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia.<sup>5</sup> Dalam sebuah kajiannya, Anderson memperhitungkan bahwa berbagai modalitas yang dimiliki budaya dan bahasa Jawa menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia relatif bergantung bahasa Jawa.<sup>6</sup> Bahasa Indonesia bahkan pernah mengalami *kramanisasi* sehingga perlu diintervensi oleh bahasa Jawa.

Padahal, di sini lain, adalah kenyataan pula bahwa negara-bangsa semakin menginter-

nasional, masyarakat menjadi semakin terglobalkan dalam berbagai aspek dan dimensinya. Hampir dalam segala peristiwa masyarakat global, salah satu solusi berbahasanya adalah kemampuan berbahasa internasional (Inggris) agar masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam realitas dan kontestasi internasional tersebut. Rendahnya kemampuan rata-rata bahasa Inggris masyarakat Indonesia semakin menyebabkan (masyarakat) Indonesia tidak diperhitungkan dalam skala internasional. Itulah sebabnya, masyarakat Indonesia seolah terpaksa dipacu untuk sedikit banyak mengerti bahasa Inggris. Sudah dapat diduga, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa yang paling laris. Bahasa Inggris memosisikan dirinya sebagai aset ekonomi yang penting dalam berbagai praktik kehidupan.

Perkembangan kekuatan ekonomi Cina dan Jepang yang hampir menjangkau seluruh pelosok dunia, juga perlu diperhitungkan sebagai lahan masa depan (politik) ekonomi berbahasa untuk menunjang kinerja masyarakat dalam mengantisipasi masa depannya. Itulah sebabnya, dalam perhitungan dan paradigma (politik) ekonomi, bahasa-bahasa Inggris, Jepang, dan Cina semakin memperlihatkan aspek komersial yang tinggi. Hal ini juga terlihat dari larisnya studi atau kursus bahasa Cina dan Jepang di berbagai jenjang pendidikan. Aspek komersial bahasa yang menginternasional dan ekonomis tersebut semakin menekan kinerja bahasa Indonesia. Boleh dikata bahasa Indonesia menjadi semakin tidak cukup signifikan diperjuangkan, baik dalam skala kepentingan internasional maupun dalam paradigma ekonomi masa depan.

Di samping itu, perkembangan ilmu dan teknologi (visual dan audio visual) tidak pelak merupakan salah satu faktor penting yang mengubah konstelasi komunikasi berbahasa sehingga aspek fungsional (verbal) bahasa (termasuk di dalamnya bahasa Indonesia) mengalami keterdesakan dan ketidakmampuan mengakomodasi proses-proses komunikasi yang semakin cepat dan mekanis. Hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa bahasa Indonesia verbal menjadi media yang tidak mampu

menjadi solusi dalam proses-proses komunikasi yang membutuhkan kecepatan. Bahasa Indonesia mengalami tekanan dalam berbagai dimensinya.

Memang, terdapat kecenderungan lain bahwa sarana-sarana berbudaya, atau sarana politik dan sosial lainnya, seperti diperlihatkan sastra dan penerbitan buku dan media cetak berbahasa Indonesia tidak memperlihatkan gejala yang menyurut. Akan tetapi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa gejala tersebut tidak dalam paradigma kebanggaan nasional berbahasa Indonesia, tetapi lebih pada tujuan-tujuan komersial dan ekonomi. Hal itu juga diperlihatkan adanya kecenderungan bahwa tidak ada beban moral dan psikologis apapun dari berbagai media tersebut untuk berjuang mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Gejala dominasi paradigma ekonomi itu tidak lain disebabkan kuatnya budaya kapitalisme yang semakin mengatur dalam mengelola kehidupan dunia. Kecenderungan itu menyebabkan berbagai institusi sosial, politik, termasuk pendidikan menyesuaikan kinerjanya agar dapat mengikuti aturan dan permainan kapitalisme tersebut (Sennett, 2006). Jika berbagai institusi tersebut tidak mampu menyalahi kinerjanya sesuai dengan aturan main kapitalisme, maka dapat diperkirakan institusi tersebut akan mengalami kebangkrutan dan terlindas.

Perubahan konteks sosial berbahasa tersebut menuntut negara (pemerintah) Indonesia perlu menerapkan strategi baru dalam "mengantisipasi" terjadinya berbagai perubahan konteks sosial tersebut. Memang, saat ini pemerintah sedang merancang dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) Republik Indonesia tentang Penggunaan Bahasa.<sup>7</sup> RPP ini tentu saja dimaksudkan sebagai salah satu strategi agar masyarakat Indonesia "kembali" memfungsikan bahasa Indonesia dalam fungsi-fungsi konvensional.

Masalahnya adalah apakah RPP atau yang kelak menjadi Peraturan Pemerintah (PP) tersebut akan memberikan daya kendali, daya konsolidasi, dan daya kontrol terhadap penguasaan kembali masyarakat Indonesia berbahasa Indonesia. Hal ini mengingat bahwa berbagai

proses komunikasi berbahasa Indonesia tidak mungkin jika hanya mengandalkan Peraturan Pemerintah, apalagi dalam RPP tersebut tidak menjanjikan apapun terhadap masa depan ekonomi berbahasa Indonesia selain aturan-aturan teknis yang justru menyebabkan terjadinya berbagai resistensi di kalangan masyarakat.

## **BAHASA DAN (MASA DEPAN) KEBANGSAAN**

Terdapat berbagai faktor lain yang menyebabkan lemahnya semangat masyarakat Indonesia berbahasa Indonesia, apalagi jika itu dikaitkan dengan berbahasa yang baik dan benar. Selain hal yang telah disebutkan di atas, maka hal itu ada kaitannya dengan potensi-potensi yang sedang terjadi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kinerja masyarakat Indonesia dalam hal bernegara dan secara langsung berhubungan dengan kinerja dan identitas kebangsaan.

Ada tiga hal yang berpengaruh terhadap satu hal lain dalam kaitan pemaknaan fungsi konvensional bahasa dalam kaitannya dengan makna kebangsaan. Ketiga hal tersebut terkondisi untuk selalu bernegosiasi dan saling menentukan antara satu hal dengan hal lain. Ketiga hal itu adalah eksistensi dan kinerja (penampilan) negara, musim kewacanaan dan paradigma yang aktual atau sedang dominan, akomodasi dan resistensi budaya lokal. Tiga hal itu berpengaruh terhadap satu hal, yakni kondisi sosial tempat praktik berbahasa.

Pertama, kalau negara memiliki kinerja, performansi, dan eksistensi yang bagus, baik di mata rakyatnya maupun di mata masyarakat internasional, maka orang Indonesia akan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kalau bangga menjadi bangsa Indonesia, tidak ada halangan untuk tidak bangga dengan segala hal yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia seperti halnya pemilikan dan praktik penggunaan berbahasa Indonesia.

Padahal, kenyataannya adalah bahwa kinerja negara tidak memperlihatkan kemampuan yang membuat masyarakat Indonesia bangga.

Indikasi dari lemahnya kinerja negara terlihat dari berbagai konflik kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di sana sini, masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran, banyaknya pelanggaran HAM dan korupsi yang tidak tertangani, dan kecenderungan lain yang mengarah pada terdapatnya asumsi negara gagal.<sup>8</sup>

Kondisi dan situasi itu memberi alasan kepada masyarakat Indonesia untuk berjuang memperbaiki nasibnya sendiri-sendiri. Tidak heran jika kemudian orang Indonesia menjadi individualis, dan tidak tertarik untuk memperbaiki kinerja bersama, apalagi jika itu dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan bersama dan identitas kolektif yang mengarah pada konsolidasi kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya, kinerja pemerintah yang buruk secara langsung menyebabkan piranti identitas warganya tidak akan terkonsolidasi dengan baik.

Persoalan itu berimplikasi luas. Ketika masyarakat Indonesia semakin individualis, terkondisi dengan kinerja negara yang lemah, maka ritus-ritus publik nasional semakin tidak ada maknanya dan dirasakan semakin tidak penting. Hal itu dapat diketahui bahwa banyak institusi di daerah yang mulai tidak menyelenggarakan perayaan (ritus) nasional. Artinya, peristiwa yang mampu memelihara kemungkinan mengkonsolidasikan fungsi konvensional bahasa Indonesia juga semakin tidak terkondisikan.

Kedua, seperti telah disinggung, musim kewacanaan yang aktual atau sedang dominan. Musim kewacanaan ini terbagi dalam tiga lapis, lapis global, lapis nasional, dan lokal. Lapis global mempengaruhi lapis nasional, lapis nasional mempengaruhi lapis lokal. Musim yang telah berjalan cukup panjang yang aktual dan dominan adalah segala sesuatu yang berbau modern dan maju. Modern itu identik dengan negara maju seperti terutama Amerika, atau beberapa negara Eropa. Indikator kemajuan itu dapat diperlihatkan dalam penggunaan simbol-simbol berbahasa atau gaya hidup yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi tersebut, kekuatan paradigma ekonomi yang menguasai paradigma lainnya menyebabkan bahasa Indonesia "tidak begitu

berarti". Bahasa Indonesia tidak lebih akan menjadi hapalan untuk ujian kelulusan bagi para pelajar. Bagi masyarakat pada umumnya, bahasa Indonesia tidak lebih sebagai cara untuk memperlihatkan "cinta bahasa Indonesia dan cinta Indonesia", atau memperlihatkan "taat aturan berbahasa" dengan memanipulasi secara simbolis nama-nama yang harus menggunakan bahasa Indonesia yang sebelumnya terlanjur ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak lebih menjadi ritus formalitas untuk tetap dianggap sebagai warga Indonesia.

Hal ketiga, akomodasi dan resistensi budaya lokal perlu diperhitungkan dalam merevitalisasi fungsi konvensional bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis dan resmi, sangat mungkin bahasa Indonesia bisa diakomodasi oleh daerah karena secara historis memang telah terjadi kesepakatan nasional untuk menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari masyarakat daerah tidak hanya dibesarkan dalam bahasa Indonesia, tetapi justru bahasa lokalnya. Dalam beberapa hal, bahasa lokal (bahasa Ibu) bahkan terasa jauh lebih emosional, ekspresif, dan kultural daripada bahasa Indonesia.

Gejala bahwa bahasa Indonesia bukan rumah kultural bahasa orang Indonesia pada umumnya sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Siegel (1997). Seperti dikatakan Siegel bahwa bahasa Indonesia tidak pernah menjadi suatu bahasa yang dilekati kebudayaan tertentu. Orang Indonesia bisa saja mengalami intimidasi karena otoritas yang dimiliki bahasa Indonesia, tetapi bisa juga memanfaatkan otoritas tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, sekaligus menjadikannya suatu medium problematik dan manipulatif untuk membangun identitas nasional atau suatu sastra nasional.

Negara tidak mampu memberi kebanggaan beridentitas Indonesia dan sekaligus terdapat resistensi bahwa bahasa Indonesia seolah menjajah bahasa daerah. Akan tetapi, hal yang lebih penting di balik itu adalah soal kenyamanan beridentitas dan berbahasa. Proses historis dan berbudaya masing-masing di lokal-lokal daerah menyebabkan masyarakat merasa

lebih nyaman berbahasa lokalnya masing-masing. Dengan bahasa lokalnya tersebut, mereka merasa lebih pasti menjadi orang Jawa, orang Minang, orang Dayak, atau orang Bali, daripada merasa menjadi orang Indonesia.

Ketiga hal tersebut berpengaruh terhadap satu hal, yakni kondisi sosial tempat praktik berbahasa. Artinya, memang tidak setiap lokasi sosial praktik berbahasa Indonesia, dengan segala kompleksitas masalahnya, memperlihatkan situasi dan kondisi yang sama. Pengalaman dan perjalanan historis menjadi bangsa dan warga Indonesia untuk setiap lokalnya berbeda-beda. Memang ada pengalaman dan bayangan berbahasa yang "dibayangkan sama" seperti yang diteorikan Anderson (2002). Akan tetapi, itu tidak mampu menjelaskan berbagai kasus yang dihadapi Indonesia ketika berbagai konflik dan kerusuhan antaretnis, ras, agama, dan kepentingan lainnya selalu berkejolak di Indonesia.

Hal yang paling bermakna adalah bahwa pengalaman dan perjalanan berbahasa setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya, antara masyarakat di Jawa Tengah yang berbahasa Jawa dan di daerah Riau yang dari dulu sudah berbahasa Melayu, atau antara masyarakat di Kalimantan Barat dengan masyarakat Papua. Kondisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah antara kota dan desa, antara lokasi yang miskin dan lokasi yang kaya, dan sebagainya. Dalam situasi itu pula bagaimana negara melaksanakan setiap daerah dengan cara yang berbeda karena kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda. Perlakuan itu ikut menentukan bagaimana daerah berhadapan dengan negara Indonesia.

Setiap lokasi sosial akan memberikan berbagai variasi masalah dalam rangka meneguhkan kembali fungsi konvensional bahasa Indonesia. Kalau berbagai konteks dan negosiasi tersebut tidak berubah, maka upaya revitalisasi fungsi bahasa Indonesia tidak akan berubah banyak. Hal-hal yang berubah hanya bersifat teknis dan prosedural, tetapi tidak bersifat substansial. Akan selalu terjadi berbagai rekayasa dan manipulasi simbolik berkaitan dengan cara masyarakat

mempraktikkan fungsi konvensional bahasa Indonesia.

Namun, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini hanya bahasa Indonesia yang masih bisa "menggaransi" keutuhan Republik Indonesia. Hanya bahasa Indonesia satu-satunya milik Indonesia yang mampu menjadi daya penghubung dan yang mempersatukan bangsa. Dapat diketahui bahwa agama, etnis, ras, dan budaya yang majemuk dan dengan tendensi yang beragam, selalu berpotensi memecah belah Indonesia. Konflik di berbagai daerah, baik atas nama agama, etnis, atau kedaerahan telah memperlihatkan kebangsaan bangsa Indonesia demikian compang-camping dan bahkan seperti dipaksakan.

## SIMPULAN

Menggeser fungsi strategis bahasa Inggris dalam praktik berbahasa tentu hampir tidak relevan dan mungkin juga tidak berguna. Begitu banyak syarat historis, ekonomis, politis, dan sosial yang menyebabkan bahasa Inggris "terlanjur" bernilai internasional dan ekonomis. Bagi masyarakat Indonesia, fungsi konvensional bahasa Indonesia telah memenuhi syarat untuk beberapa hal, tetapi mengalami tantangan dan krisis untuk fungsi (politik) ekonomi dan perubahan sarana dan konteks sosial komunikasinya.

Hal-hal teknis dan prosedural yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap upaya revitalisasi fungsi konvensional bahasa Indonesia tentu tetap dapat diperhitungkan sebagai langkah kecil dalam membangun kembali fungsi konvensional bahasa Indonesia. Akan tetapi, hal itu tidak akan pernah cukup jika masyarakat Indonesia tidak pernah merasa memiliki kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya. Selain itu, dominasi praksis dan paradigma ekonomi perlu mendapat perlawanan kultural agar terjadi berbagai keseimbangan dan keadilan agar fungsi konvensional bahasa Indonesia tidak semakin tenggelam. Persoalannya adalah dari mana perlawanan kultural tersebut didapatkan dan dikonsolidasikan.

- 1 Tulisan Umar Kayam tersebut berjudul "Budaya Massa Indonesia", aslinya bertahun 1981. Lihat tulisan tersebut dalam Idi Subandy Ibrahim (Ed.). 1997. *Ecstasy Gaya Hidup Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Mizan,
- 2 Lihat "Sebagai Bahasa Sehari-hari Bahasa Indonesia Mulai Menggeser Bahasa Daerah" dalam *Kompas*, 24 Oktober 1987
- 3 Lihat juga tulisan Greg Acciaoli, "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia", dalam *Canberra Anthropology* 8, 1985.
- 4 Lihat David Bouchier, "Kisah Adat dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini", dalam Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2010.
- 5 Pada tahun 1980-an sudah terdapat berbagai pendapat yang mengatakan bahwa Bahasa Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai Jawanisasi. Bahasa Indonesia banyak menyerap kosa-kata dari Bahasa Jawa (Sansekerta) sebagai kebijakan nasional untuk tidak terlalu banyak menyerap bahasa asing (dari luar Indonesia), khususnya Bahasa Inggris. Lihat juga tulisan Keith Foulcher, "Konstruksi Kebudayaan Nasional: Pola-Pola Hegemoni dan Resistensi", dalam Idi Subandy Ibrahim (Ed.). 1997. *Ecstasy Gaya Hidup Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Mizan.
- 6 Lihat Anderson, Benedict R OG. dalam *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press. 1990.
- 7 Lihat *Rancangan Peraturan Presiden (RPP) Republik Indonesia Tentang Penggunaan Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, 2010.

- 8 Tentang kemungkinan Indonesia sebagai negara gagal lihat tulisan MT. Zen, "Jangan Biarkan Indonesia Jadi Negara Gagal", dalam *Kompas*, 14 Mei 2008

## DAFTAR RUJUKAN

- Acciaoli, Greg. 1985. "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia", dalam *Canberra Anthropology* 8.
- Anderson, Benedict R OG. 1990. *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist-Putaka Pelajar.
- Bouchier, David. 2010 "Kisah Adat dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini", dalam Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Foulcher, Keith, 1997. "Konstruksi Kebudayaan Nasional: Pola-Pola Hegemoni dan Resistensi", dalam Idi Subandy Ibrahim (Ed.). 1997. *Ecstasy Gaya Hidup Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Kayam, Umar. 1997. "Budaya Massa Indonesia", dalam Idi Subandy Ibrahim (Ed.). *Ecstasy Gaya Hidup Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Sennett, Richard. 2006. *The Culture of the New Capitalism*. New Haven: Yale UP.
- Siegel, James T. 1997. *Fetish, Recognition, Revolution*. Princeton: Princeton University Press.